

# Transformasi Pulau Onrust: Dari Karantina Haji Hingga Penjara Politik (1933-1951)

M Bagas Kurniawan\*<sup>1</sup>

Amirudin<sup>2</sup>

Aan Budianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sejarah Peradaban, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*e-mail: [bagas.krnwn990@gmail.com](mailto:bagas.krnwn990@gmail.com)<sup>1</sup>, [amirudin@radenintan.ac.id](mailto:amirudin@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, [aanbudianto@radenintan.ac.id](mailto:aanbudianto@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

(Naskah masuk : 25 November 2024, Revisi : 07 Desember 2024, Publikasi : 15 Desember 2024)

## Abstrak

Pulau Onrust di Kepulauan Seribu memiliki sejarah panjang yang merefleksikan perubahan fungsi dalam berbagai periode pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pulau ini berfungsi sebagai tempat karantina bagi jemaah haji untuk mencegah penyebaran penyakit menular, seperti kolera, yang dibawa dari Timur Tengah. Selain alasan kesehatan, kebijakan pembatasan ini juga digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik terhadap umat Islam, yang mencerminkan kepentingan kolonial dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi fungsi Pulau Onrust, mulai dari isolasi sebagai fasilitas karantina kesehatan hingga menjadi kamp tahanan politik pada tahun 1930-an, ketika fokus kolonial beralih dari pengawasan kesehatan ke penindakan terhadap aktivisme pergerakan kemandirian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, dengan menggali sumber-sumber arsip kolonial, dokumen sejarah, dan literatur yang relevan untuk memahami konteks perubahan fungsi pulau tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peran Pulau Onrust mencerminkan dinamika kebijakan kolonial yang beradaptasi dengan tantangan sosial, politik, dan kesehatan pada masanya. Di era modern, Pulau Onrust telah menjadi situs warisan budaya yang penting, memicu perbincangan tentang pengelolaan sejarah kolonial di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kolonial dan sejarah Indonesia dengan menawarkan perspektif baru mengenai strategi pengawasan dan pengendalian kolonial, serta warisan sejarahnya yang masih relevan dalam konteks modern.

**Kata kunci:** Karantina, Penjara Politik, Pulau Onrust

## Abstract

Onrust Island in the Seribu Islands has a long history that reflects changes in function during various periods of Dutch colonial rule. In the early 20th century, the island served as a quarantine site for Hajj pilgrims to prevent the spread of infectious diseases, such as cholera, brought from the Middle East. In addition to health reasons, this restriction policy was also used as a means of social and political control over Muslims, reflecting colonial interests in maintaining the stability of power. This study aims to analyze the evolution of Onrust Island's function, from isolation as a health quarantine facility to becoming a political prison camp in the 1930s, when the colonial focus shifted from health surveillance to repression of independence movement activism. The method used in this study is a historical approach, by exploring colonial archival sources, historical documents, and relevant literature to understand the context of the island's changing function. The results show that the changing role of Onrust Island reflects the dynamics of colonial policies that adapt to the social, political, and health challenges of its time. In the modern era, Onrust Island has become an important cultural heritage site, sparking discussions about the management of colonial history in Indonesia. This research contributes to colonial studies and Indonesian history by offering new perspectives on colonial strategies of surveillance and control, and their historical legacies that are still relevant in a modern context.

**Keywords:** Onrust Island, Politic Prison, Quarantine

## 1. PENDAHULUAN

Pulau Onrust yang terletak di Kepulauan Seribu memiliki sejarah panjang dan dinamis yang mencerminkan berbagai perubahan fungsi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pulau ini digunakan sebagai tempat karantina untuk para jemaah haji yang

kembali dari Mekkah. Karantina ini didirikan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, terutama kolera, yang sering dibawa oleh jemaah haji dari Timur Tengah. Perjalanan haji saat itu melibatkan perjalanan laut yang panjang dan padat, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit di Hindia Belanda. (Farras, n.d.) Pulau Onrust, yang memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas kolonial Belanda, tidak hanya dikenal sebagai pangkalan militer, karantina haji, dan sanatorium, tetapi juga sebagai penjara politik yang menyimpan kisah-kisah kelam pengawasan kolonial. Sebagai situs warisan budaya, Onrust menjadi arena memuat mengenai identitas dan pengelolaannya di era modern.

Penelitian terdahulu, seperti *Mengungkap Kisah Tersembunyi: Karantina Haji di Pulau Onrust 1911–1933* (Kurniawan & Setiawan, 2024), menyoroti bagaimana fungsi Pulau Onrust sebagai tempat karantina haji memiliki dimensi kesehatan sekaligus sosial-politik. Fungsi ini tidak hanya melayani upaya pengendalian wabah, tetapi juga mencerminkan kebijakan kolonial yang bertujuan mengawasi mobilitas dan aktivitas umat Islam. Serupa dijelaskan oleh Dien Madjid dalam bukunya *Berhaji Masa Kolonia* (Madjid, 2008), isolasi para jemaah haji juga menjadi sarana untuk mengelola potensi perlawanan politik umat Islam terhadap pemerintah kolonial. Dengan demikian, fungsi Pulau Onrust melampaui aspek medis dan menjadi instrumen pengawasan sosial-politik yang kompleks.

Selain itu, referensi internasional, seperti penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Southeast Asian Studies* oleh Tagliacozzo, (Tagliacozzo, 2013) mengkaji bagaimana kebijakan karantina di kawasan Asia Tenggara tidak hanya bertujuan mengendalikan wabah tetapi juga memainkan peran penting dalam pengendalian kolonial terhadap komunitas Muslim. Artikel lain dari *Modern Asian Studies* oleh Iik Arifin Mansurnoor, (Mansurnoor, 1990) membahas pengawasan kolonial terhadap gerakan keagamaan di Asia Tenggara, terutama dalam konteks pelaksanaan haji dan pengaruhnya terhadap politik lokal. Penelitian tersebut menegaskan relevansi Pulau Onrust dalam konteks regional yang lebih luas, menunjukkan bahwa pengawasan mobilitas umat Islam merupakan bagian dari strategi kolonial di seluruh Asia Tenggara.

Beragam kepentingan muncul dalam menentukan bagaimana warisan sejarah ini seharusnya dikelola, mulai dari perspektif pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, hingga pihak swasta. Perdebatan ini meliputi cara penyampaian narasi sejarah kolonial, pelestarian fisik situs, hingga peluang komersialisasi pulau sebagai destinasi wisata. Kompleksitas ini menjadikan Pulau Onrust sebagai simbol penting dalam upaya memahami dan merawat sejarah politik kolonial di Indonesia. (Purnawibawa & Rahardjo, n.d.)

Pada tahun 1930-an, seiring dengan meningkatnya ketegangan politik di Hindia Belanda, fungsi Pulau Onrust mengalami perubahan yang signifikan. Pulau ini kemudian diubah menjadi kamp tahanan politik, yang menampung para aktivis dan tokoh pergerakan kemerdekaan yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Transisi ini mencerminkan perubahan dalam prioritas kolonial dari kontrol kesehatan menjadi kontrol politik, mengubah Pulau Onrust dari tempat isolasi penyakit menjadi tempat isolasi resistensi politik.

Historiografi tentang manajemen haji di Indonesia, sebagaimana diulas dalam penelitian terkait, menunjukkan dinamika pengelolaan haji dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. (Muslim, 2020) Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menggunakan pengaturan perjalanan haji, termasuk melalui karantina di Pulau Onrust, untuk mengontrol mobilitas umat Islam dan memantau aktivitas keagamaan yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan kebijakan haji sebagai alat pengawasan sosial. Transformasi pengelolaan haji setelah kemerdekaan mencerminkan upaya merekonstruksi kebijakan ini dalam kerangka yang lebih berdaulat dan independen.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan evolusi fungsi Pulau Onrust, dari karantina haji hingga menjadi penjara politik, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kebijakan kolonial Belanda di Hindia Timur. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya memperkaya studi kolonial dengan memberikan perspektif baru tentang strategi pengawasan yang dilakukan Belanda terhadap umat Islam dan pergerakan politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai sejarah

peninggalan Pulau Onrust, yang relevan dengan diskusi modern tentang pengelolaan situs warisan budaya dan sejarah di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menelusuri dan menganalisis perkembangan Pulau Onrust dalam rentang waktu 1933–1951. Langkah awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Sumber utama yang digunakan berupa arsip kolonial, seperti dokumen resmi pemerintah Belanda, laporan karantina, surat kabar lama, dan catatan administratif terkait Pulau Onrust. Arsip-arsip ini diperoleh dari lembaga kearsipan, termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan situs Dhelper. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi langsung mengenai kebijakan kolonial dan praktik yang diterapkan di Pulau Onrust pada masa itu.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder berupa buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal internasional, dan disertasi. Literatur ini berfungsi melengkapi dan memverifikasi informasi dari arsip primer, sekaligus menawarkan perspektif analitis yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Melalui kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek sosial, politik, dan kesehatan terkait Pulau Onrust dalam konteks kolonial.

Setelah data terkumpul, proses validasi dokumen dilakukan untuk memastikan keaslian dan kredibilitas sumber yang digunakan. Validasi ini meliputi pemeriksaan konteks penulisan, identitas penulis dokumen, serta kesesuaian isi dengan fakta sejarah lainnya. Langkah ini bertujuan mengurangi potensi bias interpretasi yang mungkin timbul dari penggunaan sumber yang tidak valid atau tidak relevan.

Tahapan berikutnya adalah analisis tematik, yang bertujuan mengidentifikasi pola dan isu utama dalam perubahan fungsi dan peran Pulau Onrust. Analisis ini memanfaatkan data primer untuk menggali secara mendalam terkait peristiwa tertentu, sementara data sekunder digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung interpretasi informasi kritis. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana perubahan fungsi Pulau Onrust mencerminkan dinamika kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat.

Namun, penelitian ini tidak terlepas dari batasan tertentu. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses terhadap arsip penting yang rusak atau tidak tersedia di lembaga kearsipan. Selain itu, ketidakseimbangan data, terutama dalam dokumentasi periode tertentu, menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi keutuhan analisis. Bias dalam sumber arsip, yang sering mencerminkan perspektif penjajah, juga menjadi perhatian dan memerlukan analisis kritis dalam penggunaannya. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap dinamika sejarah Pulau Onrust secara mendalam dan menyeluruh, serta memberikan kontribusi berarti terhadap kajian kolonial dan sejarah Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pulau Onrust sebagai Karantina Haji (Awal Abad 20 hingga 1933)

Pada awal abad ke-20, Pulau Onrust berfungsi sebagai pusat karantina haji bagi jemaah yang kembali dari Mekkah. Fungsi ini didesain untuk mencegah penyebaran penyakit menular, seperti kolera, yang sering dibawa jemaah setelah perjalanan jauh. Seperti yang diberitakan dalam Surabaya Handelsblad, terdapat laporan bahwa “15 penderita penyakit berri-berri dianggap sembuh, dan 35 lainnya menunjukkan perkembangan yang membaik.” Hal ini menunjukkan upaya intensif pemerintah kolonial dalam penanganan penyakit menular dengan memberikan nutrisi dan perawatan yang memadai kepada pasien di karantina. (“De Situatie Op Onrust,” 1933)

Namun, fungsi isolasi Pulau Onrust tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Dalam konteks kolonial, kebijakan ini mencerminkan strategi pengawasan yang lebih luas terhadap populasi Muslim di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial tidak hanya menyebarkan penyebaran penyakit fisik, tetapi juga penyakit ideologi yang dianggap berbahaya. Para jemaah haji yang

baru kembali sering kali membawa pengaruh dari dunia Islam global, termasuk gagasan pembaruan Islam dan penolakan terhadap kolonialisme. Dengan mengisolasi jemaah di Pulau Onrust, Belanda mencoba mengendalikan aliran informasi dan gagasan yang dapat memicu ketidakstabilan politik.

Strategi pengawasan ini bukanlah fenomena tunggal. Di wilayah kolonial lainnya, pendekatan serupa juga diterapkan, seperti di Singapura dan India Britania, di mana pemerintah kolonial menggunakan fasilitas kesehatan sebagai alat untuk mengontrol mobilitas masyarakat lokal dan mencegah penyebaran ide-ide politik yang dianggap subversif. (Anderson, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan kolonial di Asia Tenggara sering kali melibatkan tujuan politik, di mana kesehatan masyarakat dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial.

Kebijakan karantina pada masa kolonial, merupakan alat strategis yang dirancang untuk mengontrol mobilitas penduduk lokal di bawah kedok kesehatan publik. (Rhamadan, 2023) Praktik ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga untuk memperkuat dominasi kolonial dengan membatasi kebebasan gerak masyarakat pribumi, termasuk jemaah haji. Dalam konteks Pulau Onrust, karantina ini berfungsi sebagai bagian dari pengawasan terhadap umat Islam yang dianggap memiliki potensi resistensi politik, mencerminkan tumpang tindih antara kesehatan publik dan kontrol kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda memandang aktivitas keagamaan ini sebagai potensi ancaman politik, sehingga memberlakukan kontrol yang ketat, termasuk melalui karantina. (Tagliacozzo, 2013) Pulau Onrust menjadi salah satu lokasi strategis untuk mengawasi mobilitas jemaah haji sekaligus membatasi penyebaran gagasan subversif. Studi ini relevan dalam memahami bagaimana fungsi awal Pulau Onrust tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sebagai alat pengawasan sosial-politik dalam konteks kolonial.

Dari sudut budaya, pengalaman dikarantina juga mempengaruhi narasi keagamaan dan politik lokal. Para ulama dan bangsawan yang menjadi jemaah haji sering kali kembali dengan cerita-cerita tentang kontrol ketat yang alami, yang kemudian memicu di kalangan masyarakat tentang hubungan antara agama dan kekuasaan kolonial. Kelompok ini, yang memiliki kapasitas finansial dan intelektual, sering kali menjadi perantara ide-ide pembaruan Islam di wilayah lokal. Di sisi lain, batasan yang dipaksakan oleh kolonial memperkuat stereotip tentang Islam sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kolonial. Hal ini berdampak pada kebijakan diskriminatif lainnya terhadap umat Islam di Hindia Belanda, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap masjid, madrasah, dan aktivitas keagamaan.

Pulau Onrust, yang awalnya dikenal sebagai karantina, akhirnya memainkan peran penting dalam mencerminkan dinamika kolonial yang lebih luas di pusat. Kebijakan kesehatan di pulau ini tidak hanya menunjukkan bagaimana Belanda menangani isu kesehatan masyarakat tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk mengendalikan masyarakat dan ideologi yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kolonial. (Kurniawan & Setiawan, 2024) Analisis ini menegaskan bahwa Pulau Onrust merupakan representasi nyata dari pendekatan kolonial yang memadukan pengawasan kesehatan dengan pengawasan politik di seluruh wilayah kekuasaan mereka.

### **3.2. Peralihan Fungsi Pulau Onrust: Dari Karantina Menjadi Penjara Politik (1933-1951)**

Memasuki tahun 1933, fungsi Pulau Onrust berubah secara signifikan. Pada masa ini, pulau tersebut mulai digunakan sebagai penjara dan kamp tahanan politik oleh pemerintah kolonial Belanda. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya gerakan perlawanan terhadap kolonialisme di Hindia Belanda. Pulau Onrust kemudian digunakan untuk menahan para aktivis dan pemimpin gerakan pergerakan kemerdekaan yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Salah satu tokoh yang ditahan di sini adalah mereka yang terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, termasuk dari kalangan pergerakan buruh, intelektual, dan kelompok perlawanan. Para pemberontakan kapal tujuh yang ikut andil dalam peristiwa juga tak luput dari incaran tawanan politik Belanda, karena sudah dianggap melecehkan juga merendahkan marwah angkatan laut Kolonial Belanda,

sebanayak 56 pemberontak ditawan dan dibawa ke Pulau Onrust untuk diinterogasi dan ditahan. ("Het Eiland Onrust, Hitler En Het Marsixsme," 1933) Investigasi awal dilakuakn ditempat itu mulai kronologis awal kejadian meliputi sebab terjadinya pemberontakan, berhasilnya pemberontak membawa kapal hingga semenajung melayu hingga akhirnya dihentikan secara paksa oleh tenatara Belanda dengan membombardir kapal. (*De Muterij Op De Zeven Provinzien*, 1933).



Gambar 1 : Berita Peristiwa Zeven Provinzien pada koran Belanda, Nieuwe Venlosche 1933. ("De Muterij Aan Board Der Zeven Provinzien," 1933)



Gambar 2 : Berita Sanatorium Pulau Onrust dibuka kembali tahun 1940. ("Het Sanatorium Op Onrust," 1940)

Tahun 1940 diberitakan bahwa sepeninggalan Kolonial Belanda yang dijadikan sebelumnya menjadi tempat Karantina Haji, ditahun ini pengalihfungsian pulau onrust menjadi tempat karantina kesehatan seperti yang diberitakan diatas bahwasannya Pulau Onrust yang sudah memiliki fasilitas bangunan yang lengkap di era Karantina Haji, kini dibuka kembali. Penggunaan Pulau Onrust sebagai penjara politik mencerminkan strategi pengawasan yang lebih luas di wilayah kolonial Belanda. Sama seperti kebijakan pengawasan kesehatan sebelumnya, memutarbalikkan tahanan politik di pulau ini bertujuan untuk memutuskan

koneksi para pemimpin pergerakan dengan basis pendukung mereka. Strategi serupa diterapkan di koloni-koloni lain, seperti tersingkirnya aktivisme anti-kolonial di Robben Island oleh pemerintah kolonial Inggris di Afrika Selatan atau digambarkan tokoh nasionalis Filipina oleh Spanyol ke Guam. (Mandela, 2008) Praktik ini menunjukkan bagaimana penguasa kolonial menggunakan isolasi geografis sebagai alat untuk melumpuhkan perlawanan politik.

Pada periode ini, Pulau Onrust tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat isolasi kesehatan, melainkan sebagai tempat pengasingan politik bagi mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap kolonial. Tahanan politik yang ditahan di Pulau Onrust sering kali mengalami kondisi yang keras, dengan pengawasan ketat dan fasilitas yang minim. Penjara ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memadamkan semangat nasionalisme yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat pribumi. Tidak para pemberontak lokal saja yang ditahan di Pulau Onrust, seorang penulis sekaligus jurnalis berkebangsaan Belanda yang memberitakan peristiwa yang sebenarnya dalam setiap fenomena politik dan peristiwa terjadi yang membuat Belanda disudutkan oleh internasional pun turut dibawa dan ditahan di Pulau Onrust untuk diinterogasi. ("Majalah Berita Dari Dan Untuk Suriname ; Tawanan Dibawa Ke Onrust," n.d.)

Fungsi Pulau Onrust sebagai penjara politik memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Para tahanan politik di pulau ini sering mengalami kondisi keras, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai, perlakuan represif, dan keterbatasan komunikasi dengan dunia luar. Kondisi ini bukan hanya upaya untuk menyelamatkan fisik para penjaga, tetapi juga strategi psikologis untuk menghancurkan semangat mereka. Namun, kondisi terpilih yang berat ini justru sering kali memperkuat solidaritas di antara penjaga politik. Pulau Onrust menjadi tempat di mana ide-ide nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme semakin berkembang melalui interaksi di antara para tahanan. Di sisi lain, masyarakat di daratan memandang terkucilkan para tokoh ini sebagai simbol ketidakadilan kolonial, yang justru memperkuat dukungan terhadap gerakan kemerdekaan.

Penelitian tentang Penjara Wanita Boeloe di Semarang, (Sulistyaningsih, 2020) mengungkap bagaimana manajemen penjara kolonial digunakan sebagai instrumen kontrol terhadap individu yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan Belanda. Penjara ini tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga alat untuk menekan aktivitas politik perempuan pribumi. Dalam konteks Pulau Onrust, fungsi serupa terlihat dalam transformasinya menjadi penjara politik. Perbandingan ini memperlihatkan kesamaan pola pengelolaan institusi penahanan kolonial yang bertujuan melanggengkan otoritas dan membatasi ruang gerak para oposisi. Penjara, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi alat hukuman, tetapi juga ruang untuk membentuk ulang identitas sosial yang sesuai dengan kepentingan kolonial. Perspektif ini relevan untuk memahami peran Pulau Onrust sebagai penjara politik, di mana ruang tersebut digunakan untuk menekan oposisi dan mempertahankan dominasi kolonial melalui pengawasan yang sistematis. (Stoler, 1995)

Dari perspektif budaya, penggunaan Pulau Onrust sebagai penjara politik juga menciptakan narasi baru tentang kolonialisme di Hindia Belanda. Keberadaan tokoh seperti jurnalis Belanda yang memberitakan kebenaran tentang tindakan kolonial juga menyoroti bagaimana kolonialisme tidak hanya menindas masyarakat pribumi tetapi juga menghadapi perlawanan dari dalam masyarakat kolonial itu sendiri (Majalah Berita Dari Dan Untuk Suriname, nd). Narasi ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas hubungan kekuasaan di masa kolonial.

Transformasi Pulau Onrust dari karantina kesehatan menjadi penjara politik mencerminkan dinamika yang lebih luas di wilayah kolonial. Kebijakan pengawasan di Hindia Belanda merupakan bagian dari kontrol strategis yang melibatkan pengawasan kesehatan, sosial, dan politik secara bersamaan. Hal ini mencerminkan pola umum pemerintahan kolonial di Asia Tenggara, di mana pengawasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap "berbahaya" dilakukan melalui isolasi dan kontrol ruang. Pulau-pulau terpencil seperti Onrust digunakan sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan kolonial melalui pengendalian fisik dan simbolis. Pada akhirnya, peran Pulau Onrust tidak hanya mencerminkan kebijakan kolonial di

Hindia Belanda tetapi juga dinamika global dari pemerintahan kolonial di era modern, di mana pengawasan, pengawasaan, dan propaganda menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan di tengah tantangan lokal dan internasional. Dengan demikian, Pulau Onrust menjadi simbol penting dari perlawanan dan keberadaannya di masa kolonial, sekaligus menjadi pengingat bagaimana sejarah digunakan untuk membentuk narasi identitas nasional dan kolonial.

### **3.3. Penggunaan Pulau Onrust pada Masa Pendudukan Jepang Hingga Pasca Kemerdekaan Indonesia (1942-1945)**

Selama pendudukan Jepang, Pulau Onrust tetap digunakan sebagai fasilitas terpencil, tetapi dalam konteks yang berbeda. Pemerintah militer Jepang memanfaatkan pulau ini untuk menahan tawanan perang dan tahanan politik yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Meskipun penduduk Jepang relatif singkat, penggunaan infrastruktur kolonial Belanda seperti Pulau Onrust menegaskan polaitas kontinuitas dalam strategi terpencil dan pengawasan oleh rezim yang berkuasa. Pendekatan Jepang terhadap penjajah dikenal lebih keras dibandingkan era kolonial Belanda, yang mencerminkan pola represi militer yang ketat. Kondisi buruk ini menambah beban psikologis dan fisik bagi para penghuninya, menciptakan kenangan pahit yang melekat dalam sejarah pulau ini. Di sini, Pulau Onrust menjadi simbol kontinuitas berkumpul di masa transisi kekuasaan, di mana pergantian kekuasaan tidak serta-merta membawa perubahan dalam pendekatan terhadap perlawanan.

Pada tahun 1949, setelah Jepang menyerah dan Belanda kembali berupaya menguasai Indonesia, Pulau Onrust digunakan sebagai sanatorium untuk menangani wabah cacar yang melanda Batavia. Dalam periode ini, Pulau Onrust menjadi salah satu dari tiga lokasi utama perawatan dan karantina pasien, bersama dengan Puskesmas Kramat Djati dan CBZ (Centraal Burgerlijke Ziekeninrichting). Dalam sebuah buku Bumi Manusia, (Toer, 2002) menyoroti bagaimana struktur dan mekanisme sistem kolonial tetap memiliki dampak signifikan pada era pascakolonial, terutama dalam bentuk represi politik. Studi ini mengungkap bahwa elemen-elemen pengendalian sosial, seperti institusi penjara dan birokrasi yang diwariskan kolonial, terus digunakan oleh pemerintah pascakolonial untuk menjaga stabilitas dan menekan potensi oposisi. Dalam konteks Pulau Onrust, warisan kolonial ini tampak jelas, ketika fungsinya bergeser dari karantina haji menjadi penjara politik, menunjukkan kesinambungan praktik kontrol yang dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial.

Pemerintah Batavia melaksanakan vaksinasi massal, dengan delapan hingga sembilan ribu orang mencapai ulang setiap minggunya. Upaya ini menyadarkan akan pentingnya pengendalian epidemi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah kolonial. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pengawasan kesehatan seperti ini juga diterapkan di koloni lain, seperti penanganan wabah pes di India oleh Inggris atau pengelolaan wabah di Filipina oleh Spanyol. ("Indonesische Documentatie Dienst," 1949) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan di wilayah kolonial sering kali digunakan tidak hanya untuk alasan medis tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial dan politik.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pulau Onrust tetap digunakan sebagai penjara oleh pemerintah Indonesia yang baru. Pada masa revolusi kemerdekaan, pulau ini menjadi tempat terpencil bagi kolaborator Belanda dan mereka yang dianggap sebagai musuh negara. Pemerintah Indonesia memanfaatkan infrastruktur peninggalan kolonial untuk mengelola tantangan keamanan internal di masa transisi. Sementara itu, pada tahun 1950, Pulau Onrust menjadi lokasi terpencil tentara KNIL yang terlibat dalam pemberontakan, seperti penyerangan APRA di Bandung dan insiden penolakan yang ditugaskan oleh prajurit KNIL dari Kepulauan Riau. ("Serdadu Keamanan KNIL Di Onrust," 1950) Penggunaan pulau ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola dinamika internal yang muncul akibat perubahan politik pasca-kemerdekaan.

Peran Pulau Onrust selama beberapa dekade sebagai fasilitas tersingkir, baik di era kolonial maupun pasca-kemerdekaan, memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Bagi para penghuni, terasing di pulau ini sering kali menjadi pengalaman traumatik, dengan kondisi

yang keras dan isolasi dari keluarga serta masyarakat. Namun, bagi masyarakat luas, Pulau Onrust menjadi simbol represi yang melahirkan solidaritas dan semangat perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Dari perspektif budaya, Pulau Onrust menjadi bagian dari narasi besar kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Di masa kolonial, pengawasan ketat terhadap tahanan politik mencerminkan kekhawatiran kolonial terhadap kebangkitan nasionalisme. Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan peran ini, tetapi dengan narasi baru yang fokus pada konsolidasi negara-bangsa.

Penggunaan Pulau Onrust sebagai tempat terpencil mencerminkan pola kebijakan kolonial yang serupa di banyak wilayah lain. Misalnya, Inggris menggunakan pulau Saint Helena untuk menahan Napoleon Bonaparte, sementara Jepang mengadopsi strategi yang sama di pulau terpencil seperti Pulau Wake. Dalam skala yang lebih luas, kebijakan pencahayaan ini menjadi alat untuk menyerukan perlawanan dan mempertahankan dominasi kekuasaan.

Dengan berakhirnya peran strategis Pulau Onrust pada tahun 1951, pulau ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang penuh dinamika, mulai dari isu kesehatan, pengawasan politik, hingga konflik pasca-kolonial. Kisah Pulau Onrust menjadi cermin bagaimana infrastruktur kolonial tidak hanya menjadi bagian dari pemikiran tetapi juga menjadi titik tolak transformasi sosial-politik Indonesia menuju kesejahteraan penuh.

### 3.4. Dampak Sosial dan Signifikansi Penggunaan Pulau Onrust sebagai Penjara

Penggunaan Pulau Onrust sebagai penjara politik pada periode 1933 hingga 1951 mencerminkan kebijakan strategis pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan di tengah meningkatkan perlawanan rakyat pribumi. Penahanan tokoh-tokoh politik di pulau ini bertujuan untuk memutuskan hubungan mereka dengan para pendukung serta membatasi penyebaran ide-ide anti-kolonialisme. (SANG, n.d.) Tahanan yang diasingkan di Pulau Onrust sering kali adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan kolonial.

Meski terisolasi, banyak di antara mereka yang tetap memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan setelah masa tersingkir mereka berakhir. Strategi isolasi ini, meskipun efektif dalam jangka pendek, sering kali malah memperkuat solidaritas di kalangan pendukung dan mendukung munculnya ide-ide baru untuk melawan kolonialisme.

Pulau Onrust tidak hanya berfungsi sebagai tempat politik terpencil, tetapi juga menjadi simbol kekuatan kolonial Belanda. Upaya pengawasan dan kontrol sosial seperti ini dapat ditemukan di berbagai wilayah kolonial lainnya. Misalnya:

#### 1) Pengawasan Kesehatan:

Sistem karantina di Pulau Onrust untuk jemaah haji yang mencerminkan penggunaan kesehatan masyarakat sebagai alat pengendalian sosial. Hal ini mirip dengan kebijakan pengawasan kesehatan di koloni Inggris di India selama wabah pes dan di Filipina oleh Spanyol untuk mencegah penyebaran kolera. Pemerintah kolonial sering kali memanfaatkan isu kesehatan untuk mengizinkan pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat pribumi, terutama yang dianggap berisiko membawa ide-ide radikal.

#### 2) Pengasingan Politik:

Penggunaan pulau terpencil untuk terpencil politik juga dilakukan oleh kolonial Inggris di Pulau Robben, tempat Nelson Mandela ditahan, dan oleh Prancis di Kaledonia Baru untuk perlawanan dari pemberontakan di Aljazair. Seperti Pulau Onrust, lokasi-lokasi ini dipilih karena keterpencilannya, yang meminimalkan risiko memobilisasi perlawanan.

Sebagai tempat pencahayaan politik, Pulau Onrust memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan:

##### a) Isolasi dan Perlawanan:

Penahanan di pulau ini menciptakan pengalaman kolektif di antara tahanan politik, yang memperkuat solidaritas mereka. Banyak di antara mereka yang kembali ke masyarakat dengan tekad yang lebih kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pulau ini menjadi saksi perjalanan tokoh-tokoh nasional yang gagasan-gagasannya terus hidup meski dalam kondisi sulit.

- b) **Simbol Perlawanan:**  
Dalam narasi sejarah Indonesia, Pulau Onrust menjadi simbol represi kolonial sekaligus tempat lahirnya semangat perlawanan. Fasilitas penjara yang dibangun di pulau ini menjadi pengingat tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuasaan asing.
- c) **Warisan Infrastruktur Kolonial:**  
Berbagai fasilitas yang ada di Pulau Onrust, mulai dari kapal galangan hingga karantina haji, menunjukkan bagaimana Belanda memanfaatkan infrastruktur untuk mendukung dominasi mereka. Setelah kemerdekaan, infrastruktur ini menjadi bagian dari warisan sejarah Indonesia, meski fungsinya telah berubah.

#### 4. KESIMPULAN

Pulau Onrust memiliki sejarah panjang yang mencerminkan transformasi fungsi, dari pusat kesehatan pada awal abad ke-20 hingga menjadi penjara politik selama periode 1933–1951. Sebagai karantina haji, Pulau Onrust berperan strategis tidak hanya dalam pengendalian penyakit menular seperti kolera tetapi juga sebagai alat pengawasan politik terhadap umat Islam yang dianggap berpotensi menantang kekuasaan kolonial. Transformasi fungsinya menjadi perlawanan politik mencerminkan meningkatnya perlawanan rakyat pribumi dan perubahan kebijakan kolonial dalam menghadapi dinamika pergerakan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi sejarah kolonial dengan menyoroti bagaimana Pulau Onrust menjadi alat pengendalian sosial dan politik dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Dalam pengelolaan warisan budaya, penelitian ini menegaskan pentingnya Pulau Onrust sebagai situs sejarah yang mewakili kompleksitas hubungan kolonial dan perjuangan nasional. Pulau ini tidak hanya melambangkan kekuasaan kolonial tetapi juga lambang perlawanan yang relevan dalam narasi sejarah Indonesia modern.

Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih lanjut dalam peran Pulau Onrust dalam konteks geopolitik kolonial, misalnya, bagaimana posisi dalam jaringan kontrol maritim di Nusantara mempengaruhi strategi kolonial Belanda. Selain itu, kajian tentang interaksi antara tahanan politik di Pulau Onrust dan masyarakat lokal dapat menambah pemahaman mengenai dampak sosial dari fungsi pulau ini. Penelitian komparatif dengan situs serupa di wilayah kolonial lain juga dapat memberikan wawasan global mengenai pola pengawasan kolonial.

Pulau Onrust, dengan warisannya yang unik, memiliki potensi besar dalam pariwisata. Sebagai bagian dari kawasan Kepulauan Seribu, pulau ini dapat terlibat dalam program edukasi sejarah dan promosi budaya untuk menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Pengembangan situs Pulau Onrust sebagai destinasi pariwisata sejarah perlu dilengkapi dengan narasi yang menggabungkan masa lalu kolonial dengan relevansi modern, sehingga generasi kini dapat menghargai warisan sejarahnya sekaligus memahami pentingnya pelestarian budaya.

Transformasi Pulau Onrust dari tempat isolasi hingga penjara politik memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika sosial-politik di Hindia Belanda dan awal Indonesia merdeka. Perannya yang beragam menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara kekuasaan, kontrol sosial, dan perjuangan untuk kebebasan, menjadikannya situs yang patut dihormati dan dipelajari lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, W. (2020). *Colonial pathologies: American tropical medicine, race, and hygiene in the Philippines*. Duke University Press.
- De munterij aan board der Zeven Provinzien. (1933). *Nieuwe Venlosche*.
- De Muterij Op De Zeven Provinzien. (1933).
- De Situatie Op Onrust. (1933). *Stads Nieuws*.
- Farras, T. (n.d.). *Pelayaran haji dari pelabuhan tanjung priok di batavia tahun 1922-1937*. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.
- Het eiland Onrust, Hitler en het Marsixisme. (1933). *The People*.

- Het Sanatorium op Onrust. (1940). *Batavia Newspaper*.
- Indonesische Documentatie Dienst. (1949). *Aneta Layanan Dookumentasi*.
- Kurniawan, M. B., & Setiawan, A. M. (2024). MENGUNGKAP KISAH TERSEMBUNYI: KARANTINA HAJI DI PULAU ONRUST 1911-1933. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 5(01), 74–86.
- Madjid, M. D. (2008). *Berhaji Di Masa Kolonial*. Sejahtera.
- Majalah berita dari dan untuk suriname ; tawanan dibawa ke onrust. (n.d.). *De West*.
- Mandela, N. (2008). *Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela*. Hachette UK.
- Mansurnoor, I. A. (1990). Modern Asian Studies. *Modern Asian Studies*, 24(1). <http://www.jstor.org/stable/312500>
- Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 51–66.
- Purnawibawa, R. A. G., & Rahardjo, S. (n.d.). *Contested Identities in Onrust Island Heritage Management*.
- Rhamadan, F. S. (2023). *PENANGANAN EPIDEMI KOLERA DI BATAVIA TAHUN 1900-1920*. Universitas Siliwangi.
- SANG, A. A. A. (n.d.). *JAKARTA DARI MASA KE MASA: KAJIAN IDENTITAS KOTA MELALUI TINGGALAN CAGAR BUDAYA JAKARTA FROM TIME TO TIME: STUDY OF CITY'S IDENTITY THROUGH THE CULTURAL HERITAGE*.
- Serdadu Keamanan KNIL di Onrust. (1950). *Breda Newspaper*.
- Stoler, A. L. (1995). *Race and the education of desire: Foucault's history of sexuality and the colonial order of things*. Duke University Press.
- Sulistyaningsih, A. (2020). *Penjara Wanita Boeloe di Semarang Tahun 1900-1940: Manajemen Penjara Masa Kolonial*.
- Tagliacozzo, E. (2013). *The longest journey: Southeast Asians and the pilgrimage to Mecca*. Oxford University Press.
- Toer, P. A. (2002). *Bumi Manusia: Tetralogi Buru# 1*. Hasta Mitra.